

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan rakyat. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum.

Sebagai sebuah negara modern, Indonesia memiliki sejarah panjang perjalanan partai politik. Jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 1955, cikal bakal partai politik telah ditandai dengan menjamurnya organisasi-organisasi modern pada awal abad ke-20. Kesadaran untuk berserikat dan berkumpul di kalangan pribumi, non-pribumi, maupun indo di Hindia Belanda pada masa itu diwujudkan dengan mendirikan perkumpulan yang memiliki struktur organisasi serta anggaran dasar hingga anggaran rumah tangga. Selain didirikan sebagai ajang berkumpul sesama profesi, agama, hingga etnis, banyak dari organisasi ini yang memiliki visi politik.

Salah satu organisasi yang berkembang menjadi partai politik adalah Partai Golkar. Kelahiran partai Golkar pada era politik multipartai saat ini tentu

tidak dapat dipisahkan dengan sejarah maraton kemunculan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) pada tanggal 20 Oktober 1964 sampai akhirnya “dibaptis” menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971 atau dua minggu setelah pemilu pertama di awal kebangkitan Orde Baru pada tanggal 5 Juli 1971 melalui musyawarah Sekber Golkar (Saidi dalam Alkhatab, 2009:35). Pada mulanya kehadiran Sekber Golkar dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta kekuatan-kekuatan sayap kiri lainnya. Hanya saja setelah kudeta 1965, Sekber Golkar secara berangsur-angsur berubah menjadi semacam partai politik (Suryadinata dalam Alkhatab, 2009:35).

ABRI menyadari bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan itu adalah berlatar belakang politik. Salah satu langkah yang diambil oleh ABRI adalah penggalangan golongan-golongan fungsional (suatu golongan masyarakat menurut tugas pekerjaannya yang mempunyai fungsi menyokong masyarakat) dengan maksud agar golongan-golongan fungsional tersebut dapat diajak turut serta dalam usaha pemulihan keamanan. Ajakan ABRI kepada golongan fungsional mendapat sambutan yang baik dan menjadi satu dalam naungan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya).

Golkar terus mengalami kemajuan dari Sekber Golkar berubah menjadi Golkar pada masa Orde Baru. Dan bisa dikatakan Partai Golkar menjadi mesin politik Soeharto saat itu. Itu sebabnya Partai Golkar berada pada puncak keberhasilan sebagai organisasi politik yang dominan. Namun, setelah Indonesia

memasuki babak baru yaitu berakhirnya masa Orde Baru Golkar (Golongan Karya) mengalami kemunduran karena dianggap Golkar adalah bagian dari Soeharto. Dan Golkar dianggap harus menanggung semua “dosa-dosa” yang telah dilakukan pada masa Orde Baru.

Turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi awal baru bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di segala aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Diikuti dengan keinginan-keinginan masyarakat akan adanya perubahan. Pada saat itu, Partai Golkar juga menerima segala kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Dan terlihat memang dampak dari kemarahan masyarakat, Partai Golkar kehilangan pendukungnya dan juga mengalami kemunduran.

Bukti dari kemunduran Partai Golkar adalah perolehan suara Partai Golkar yang menurun pada Pemilu pasca jatuhnya Orde Baru. Pemilu pertama di Era Reformasi segera dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999. Pada saat itu Partai Golkar mengalami kemerosotan, perolehan suara Partai Golkar yaitu mencapai 22,44% dengan 23.741.758 suara atau sebanding dengan 120 kursi di legislatif di tingkat pusat (Kahariady dalam Alkhatab, 2009:46). Sangat jauh berbeda dari perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya dimana Partai Golkar mencapai lebih dari 50% suara.

Pada pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2004, partai Golkar kembali bangkit dan memperoleh posisi pertama dengan perolehan suara 21,58% yaitu 24.480.757 suara. Partai Golkar kembali mendapat simpati dari rakyat meskipun

tidak begitu signifikan naiknya perolehan suara, namun partai Golkar kembali menduduki posisi pertama.

Perolehan suara partai Golkar yang menurun secara nasional pada pemilu tahun 1999, tidak terlepas dari penurunan suara dari setiap provinsi di Indonesia termasuk provinsi Sumatera Utara. Saat itu, Sumatera Utara menyumbangkan 21,84% yaitu 1.128.529 suara (Alkhatib, 2009:46). Dan pada pemilu tahun 2004 Partai Golkar kembali menduduki posisi pertama secara nasional, dan diikuti peningkatan perolehan suara di provinsi Sumatera Utara dengan perolehan 1.160.411 suara.

Dalam buku peta politik pemilihan umum 1999-2004 (kompas, 2004:77) digambarkan bagaimana perolehan suara partai Golkar di Kota Medan pada pemilu tahun 1999. Pemilu 1999, PDIP berhasil menggantikan posisi Golkar, menjaring 41,4% suara. Berada di posisi kedua PAN, partai politik baru dengan 20,3%. Baru di posisi ketiga Partai Golkar mendapat tempat dengan perolehan 13,5% yaitu 179.662 suara. Namun menariknya pada tahun 2004 Partai Golkar mengalami peningkatan perolehan suara secara nasional dan provinsi, hal sebaliknya terjadi di Kota Medan, pada pemilu 2004 partai Golkar di Kota Medan mengalami penurunan perolehan suara yaitu 123.091 suara.

Kesadaran untuk tetap eksis di perpolitikan membuat Partai Golkar mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang berhasil membuat Partai Golkar mempertahankan diri bahkan keluar dari masa krisisnya. Strategi adalah pola atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan berbagai pertimbangan

kondisi yang dihadapi. Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada masa Reformasi Partai Golkar di Kota Medan terus mengalami penurunan perolehan suara dalam pemilu dua periode. Sehingga menarik untuk meneliti strategi yang dilakukan Partai Golkar untuk terus eksis di perpolitikan dan pemerintahan khususnya di Kota Medan.

Kota Medan adalah ibukota dari provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar di luar Pulau Jawa dan kota metropolitan terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Luas Kota Medan adalah sekitar 26.510 ha atau setara dengan 265,10 km² dengan jumlah penduduk 2.210.624 jiwa. Berdasarkan letak geografis, Kota Medan masuk ke dalam wilayah pemilihan Sumatera Utara I (SUMUT I). Selain Kota Medan ada juga Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Dan Kota Medan merupakan salah satu kota yang perolehan suara Golkar tidak stabil atau cenderung naik turun dalam kurun waktu dua kali pelaksanaan Pemilu pasca Orde Baru.

Berdasarkan deskripsi diatas, perolehan suara Partai Golkar di awal reformasi sangat turun drastis. Namun pada pemilu tahun 2004 perolehan suara partai Golkar yang kembali mencapai posisi pertama berbanding terbalik dengan perolehan suara yang mengalami penurunan di Kota Medan. Penulis tertarik untuk mengangkat dari tahun 1999-2009 karena awal 1999 adalah jatuhnya Orde Baru yang membawa kemunduran bagi Partai Golkar dan tahun 2004 semakin menunjukkan Partai Golkar kehilangan Pendukungnya karena pada Pemilu 2004 di Kota Medan Partai Golkar mengalami penurunan lagi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti Partai Golkar dalam kajian sejarah. Berdasarkan deskripsi

didas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan Partai Golkar untuk mempertahankan eksistensinya pasca jatuhnya orde baru dengan judul penelitian **“Strategi Partai Golkar Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Reformasi di Kota Medan (1999-2009)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Eksistensi Partai Golkar pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).
2. Strategi yang dilakukan sehingga Partai Golkar terus berkembang dan eksis pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).
3. Strategi Partai Golkar dalam pemerintahan pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah bahwa kajian tentang Partai Golkar memiliki rentang kajian yang relatif luas. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah agar dapat lebih terarah dan fokus. Maka peneliti memfokuskan pada **“Strategi Partai Golkar Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Reformasi di Kota Medan (1999-2009)”**.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana eksistensi Partai Golkar pada era reformasi di Kota Medan (1999-2009)?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan sehingga Partai Golkar terus berkembang dan eksis pada era reformasi di Kota Medan (1999-2009)?
3. Bagaimana strategi Partai Golkar dalam pemerintahan pada era reformasi di Kota Medan (1999-2009)?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Partai Golkar pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan sehingga Partai Golkar terus berkembang dan eksis pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).
3. Untuk mengetahui strategi Partai Golkar dalam pemerintahan pada era Reformasi di Kota Medan (1999-2009).

1.6 Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang Partai Golkar.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menuangkan buah pikiran dalam bentuk skripsi.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai partai Golkar.
4. Menambah sumber kajian Mahasiswa Pendidikan Sejarah tentang Sejarah Lokal dalam cakupan Sejarah Nasional.
5. Untuk memperkaya Arsip Kota Medan.
6. Sebagai sumber belajar sejarah dan bahan informasi kepada masyarakat Kota Medan.
7. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh objek terkait untuk digunakan sebagai literatur mengevaluasi serta memprediksi langkah partai kedepannya.